

DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA

Rizqie Novita Sari

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail: nrizqie@yahoo.co.id

Sugiharti

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Badan Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg* disingkat BFO) merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. BFO dibentuk Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia (RI), tetapi pada akhirnya BFO ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. BFO menyadari bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia. RI telah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. BFO menjadi pemberitaan surat kabar di Indonesia tahun 1948 sampai tahun 1949, karena usahanya mendekati RI dan juga mendekati Belanda. Usaha yang dilakukan BFO tersebut bertolak belakang dengan usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) tanpa keikutsertaan RI. Surat kabar republik, seperti surat kabar Merdeka memberitakan usaha tersebut sebagai peringatan bagi republieken untuk waspada terhadap setiap usaha yang dilakukan Belanda dan BFO dalam memecah belah persatuan Indonesia. Pandangan republieken berubah sejak melihat usaha yang dilakukan BFO mendekati RI untuk berjuang bersama memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Pada surat kabar Pelita Rakjat pemberitaan mengenai federalisme dan BFO digunakan sebagai bukti bahwa hampir semua rakyat Indonesia menginginkan bentuk federalisme kecuali RI. Pada akhirnya BFO mampu menunjukkan bahwa federalisme merupakan salah satu jalan menuju kemerdekaan dan hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya kehadiran RI.

Kata Kunci : BFO, pengakuan kedaulatan, pemberitaan surat kabar

Abstract

The Federal Consultative Assembly (Bijeenkomst voor Federale Overleg or BFO) was a committee consists of the federal states and the special territories established by Netherlands in Indonesia. The Netherlands established BFO to match power of the Republic Indonesia (RI), but ultimately BFO helped Republic to recognition for Indonesian sovereignty. BFO realize that position of Republic will never change in the view of Indonesian. Republic of Indonesia has been the symbol of Indonesia's independence from colonialism. BFO reporting into newspapers in Indonesia 1948 until 1949, because of his efforts to approach the Republic and the Netherlands. Venture undertaken BFO the contrast with effort to the Netherlands to form United States of Indonesia (NIS) without Republic. Republic the newspaper such as Merdeka newspaper reported the effort as a warning to republieken to be aware of any effort the Netherlands and BFO in divide the unity of Indonesia. Republieken outlook for BFO changed since seeing the work done BFO approach RI to fight alongside recognition of Netherlands sovereignty to Indonesia. In the Pelita Rakjat newspaper reporting on federalism and the BFO is used as evidence that almost all Indonesian people want federalism but unless RI. In the end BFO able to show that federalism is one way to freedom, and it would be meaningless without the presence of RI.

Keywords: BFO, the recognition of sovereignty, the newspapers

A. Pendahuluan

Tahun 1945-1949 di Indonesia dikenal sebagai periode revolusi fisik. Pada periode revolusi fisik muncul gerakan politik yang dilakukan Belanda untuk menghapus Republik Indonesia (RI) dengan menyebarkan federalisme di Indonesia. Tindakan

Belanda tersebut berhasil membentuk negara federal dan daerah otonom di Indonesia. Setelah pembentukan negara federal dan daerah otonom, Belanda mengupayakan penggalangan dukungan membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) pada konferensi yang diadakan pada tanggal 27 Mei 1948 di Bandung.

Konferensi 27 Mei dikenal sebagai konferensi federal, karena dihadiri oleh negara federal dan daerah otonom bentukan Belanda. Konferensi federal membicarakan tentang pembentukan dan pembangunan NIS, permasalahan kewarganegaraan NIS, dan hubungan sesama negara federal ataupun hubungan antara negara federal dengan NIS. Konferensi federal juga membicarakan tentang rancangan pemerintah federal sementara yang telah di buat van Mook. Rancangan pemerintah federal sementara pada dasarnya sama dengan pemerintah Hindia Belanda karena pemimpin tertingginya tetap gubernur Hindia Belanda.

Konferensi federal pada akhirnya menimbulkan kekecewaan beberapa negara federal dan daerah otonom yang menjadi peserta konferensi. Kekecewaan peserta konferensi federal dikarenakan peserta tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan pemerintah sementara. Kekecewaan tersebut menyebabkan Ide Anak Agung Gde Agung dan R. T. Adil Puradiredja berpendapat perlu mengadakan kembali suatu konferensi negara federal dan daerah otonom. Konferensi akan diadakan pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung dan bernama resmi konferensi kenegaraan, serta bertujuan menghasilkan suatu rancangan pemerintah sementara yang lebih baik dari rancangan pemerintah sementara buatan van Mook. Anggota konferensi tersebut kemudian dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Federal (BFO).

Konferensi BFO tanggal 7 Juli 1948 ditunda karena belum semua undangan hadir dalam konferensi tersebut. Konferensi dibuka kembali pada tanggal 12 Juli dengan dihadiri wakil dari KDB. Wakil yang hadir dalam konferensi kenegaraan bulan Juli adalah berasal dari Banjar, Bangka, Biliton, Dayak Besar, Indonesia Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Pasundan, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan Madura. Konferensi tersebut juga dihadiri oleh peninjau yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Padang.

Pada upacara pembukaan konferensi federal telah ada dua pihak yang berbeda pendapat., yaitu pihak Ide Anak Agung Gde Agung yang pro RI dan pihak Sultan Hamid II yang pro Belanda. Masing-masing pihak membenarkan pendapatnya dan berusaha mempengaruhi anggota yang lainnya. Perbedaan pendapat dalam BFO antara pihak Anak Agung dan pihak Sultan Hamid II menghambat pergerakan BFO dalam membantu RI. Anak Agung yang pro kepada RI berusaha mempengaruhi anggota BFO lainnya untuk mengajak RI masuk ke dalam pemerintah federal sementara di Indonesia, sedangkan pihak Sultan Hamid II yang pro terhadap Belanda tidak setuju. Usaha yang dilakukan oleh Anak Agung dan Adil Puradiredja berhasil membawa BFO mendekati RI dan berjuang bersama RI menghadapi Belanda pada konferensi meja bundar (KMB).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, serta historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu surat kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat tahun 1948 sampai tahun 1949, serta dari bahan pustaka dan referensi lain yang relevan.

C. Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal (BFO)

Van Mook berencana membentuk negara federasi di Indonesia. Rencana tersebut mengharuskan van Mook mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ketatanegaraan mengalami hambatan karena di Indonesia telah berdiri RI, sehingga Van Mook mengawali rencana membentuk negara federal dengan menyebarluaskan federalisme di Indonesia pada konferensi Hoge Veluwe. Konferensi tersebut gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang menginginkan RI juga masuk dalam persemaikmuran di bawah Belanda.

Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi langkah awal membentuk negara federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai negara bagian yang pertama didirikan. Setelah itu Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah otonom lainnya di Indonesia.

Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk mewujudkan rencananya membentuk NIS di Indonesia. Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948 bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan daerah otonom di Indonesia, yaitu Indonesia Timur, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Pasundan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka, dan Riau.

Pada konferensi federal van Mook mengajukan suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya, yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara (*Voorlopige Federale Regering* disingkat VFR).¹ VFR rancangan van Mook merupakan lembaga pemerintahan yang telah ada di Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia. Pemimpin VFR tetap seorang wakil dari pemerintahan Belanda di Indonesia dan para staf yang berasal dari mayoritas orang Belanda. Pemimpin VFR adalah van Mook.

Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun usul perubahan rancangan VFR. Kekecewaan tersebut membuat Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali

mengadakan konferensi serupa yang bertujuan membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia. Konferensi tersebut diadakan di Bandung tanggal 7 Juli 1948 dan diberi nama konferensi satuan-satuan kenegaraan atau konferensi kenegaraan (*Staatkundige Eenheden Conferentie*). Konferensi kenegaraan lebih dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg* disingkat BFO).

Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.

Sepanjang pelaksanaan konferensi terlihat dua kelompok yang bersebarangan. Kelompok pertama terdiri dari Negara Indonesia Timur (NIT), Pasundan, Madura, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, dan Jawa Tengah. Pemimpinnya adalah Anak Agung (NIT) dan Puradiredja (Pasundan). Kelompok kedua terdiri dari Negara Sumatera Timur (NST), Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Biliton, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Padang, dan Jawa Timur. Pemimpinnya adalah Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) dan T. Mansur (NST).

Wakil dari NIT dan wakil dari Kalimantan memiliki perbedaan pandangan, meskipun masing-masing setuju mengenai sistem pemerintahan yang baik bagi seluruh Indonesia adalah federal. Beberapa hal yang menyebabkan wakil NIT dan Kalimantan Barat bersebarangan diantaranya adalah pertama wakil dari NIT pro terhadap RI berupaya agar RI ikut dalam pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya NIS, sedangkan wakil dari Kalimantan Barat yang pro terhadap Belanda menginginkan keberadaan RI tidak harus dalam pemerintahan peralihan. Kedua wakil dari NIT mengakui bahwa RI merupakan simbol perjuangan bagi seluruh Indonesia sehingga

¹ R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006, hlm.112.

keberadaan RI tidak dapat begitu saja diabaikan, sedangkan wakil dari Kalimantan Barat tidak sependapat dengan wakil NIT. Wakil dari Kalimantan berpendapat bahwa negara-negara bagian dan daerah otonom telah menjadi negara yang bebas dan mampu mengembangkan wilayahnya.

BFO kembali melanjutkan konferensinya selama tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948. Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang dinamai Pemerintah Federal Interim (*Federale Interim Regering* disingkat FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. Setelah berdiskusi cukup lama BFO mengeluarkan sebuah resolusi dan tambahan yang akan disampaikan oleh sebuah panitia. Panitia tersebut akan mengirimkan resolusi kepada van Mook di Jakarta, pemerintah Belanda di Den Haag, dan pemerintah RI di Yogyakarta.

BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat Jl. Penjambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir pasal. Kesimpulan dalam konferensi BFO adalah adanya perbedaan pendapat peserta konferensi tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat. Pendapat tersebut adalah pertama wakil NIT berpendapat bahwa berdirinya Negara Indonesia Serikat yang berdaulat selambat-lambatnya tercapai pada tanggal 1 Januari 1949. Pendapat dari wakil NIT disetujui oleh Negara Pasundan dan Negara Madura. Kedua wakil dari Kalimantan Barat berpendapat bahwa 1 Januari 1949 sebagai patokan saja dan bisa berubah oleh beberapa hal. Pendapat dari wakil Kalimantan Barat disetujui

oleh Bangka, Biliton, Dayak Besar, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur.

Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah otonom di dewan perwakilan rakyat berdasarkan jumlah penduduk. Golongan minoritas juga mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan perwakilan.

Setelah dikeluarkannya resolusi BFO yang pertama, tujuan yang dimiliki BFO semakin jelas, yaitu pembentukan pemerintah federal dan pengakuan kedaulatan seutuhnya bagi Indonesia. BFO meyakini bahwa RI bersedia bekerja sama dengan BFO dalam pemerintah federal apabila dalam pemerintahan tersebut dipimpin oleh orang-orang Indonesia.

D. Perbedaan persepsi mengenai BFO dalam pemberitaan surat kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat

BFO yang merupakan bentukan Belanda dan beraliran federalisme bersama RI menghadapi Belanda di konferensi meja bundar (KMB). Sikap BFO tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari golongan *republieken* dan golongan federalis.

Pertanyaan dari kedua golongan tersebut dan pihak asing lainnya menjadi bahan pemberitaan dari surat kabar periode 1948-1949. Pemberitaan surat kabar digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh BFO, Belanda, dan Indonesia. contoh surat kabar yang aktif memberitakan BFO adalah surat kabar Merdeka dan Pelita Rakjat.

Surat kabar Merdeka menjadi corong perjuangan *republieken*. Pemberitaan surat kabar Merdeka pada dasarnya mengenai keinginan *republieken* untuk merdeka dan berdaulat secara utuh tanpa melalui pemerintah interim di bawah kekuasaan Belanda. Bagi

republieken, pemerintah interim yang berada di bawah kekuasaan Belanda sama seperti kembali kepada penjajahan Belanda atas Republik.

Lahirnya BFO menimbulkan sikap waspada dan ketidakpercayaan terhadap setiap usaha yang akan dilakukan oleh negara federal dan daerah otonom bentukan Belanda. Surat kabar Merdeka menunjukkannya dengan pemberitaan mengenai usaha membentuk negara federalis di Indonesia. Surat kabar Merdeka melalui pemberitaan tersebut berharap masyarakat yang pro kepada RI mengetahui rencana Belanda, sehingga masyarakat mengerti dan waspada terhadap rencana Belanda membentuk negara federalis yang berada di bawah kekuasaan Belanda.

Sikap surat kabar Merdeka tersebut kemudian ditunjukkan dengan pemberitaan tanggal 17 Juli 1948 dengan judul "*perundingan di Kaliurang tidak membawa bahan baru*". BFO dipandang sebagai antek Belanda yang akan membawa RI pada permasalahan baru dikemudian hari dengan Komisi Jasa-jasa Baik (KDB). Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang berkaitan dengan sikap RI selama ini. RI hanya mempertimbangkan usul dan keputusan yang berasal dari pihak resmi seperti PBB melalui Dewan Keamanan dan KDB, atau perwakilan resmi Belanda di bawah pengawasan KDB. Pandangan tersebut muncul dalam pemberitaan surat kabar Merdeka karena (1) latar pembentukan BFO setelah pelaksanaan konferensi federal 27 Mei; (2) anggota BFO yang merupakan negara dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia; dan (3) konferensi BFO pada bulan Juli tidak dihadiri van Mook selaku wakil Belanda pada pemerintahan di Indonesia.

Golongan *republieken* meragukan usaha BFO untuk mempertahankan resolusinya di hadapan Belanda. *Republieken* memandang bahwa BFO memiliki kekuatan yang lemah karena terdiri dari negara dan daerah otonom bentukan Belanda, sehingga BFO akan menuruti semua kehendak Belanda. Pandangan yang negatif dari kalangan *republieken*

melalui pemberitaan surat kabar Merdeka tidak menghentikan langkah BFO untuk memperjuangkan resolusi bandung agar diterima Belanda dan RI.

Usaha BFO mendekati Belanda dan RI menimbulkan pandangan baru di kalangan *republieken* dan federalis. Kedua pihak tersebut memandang BFO sebagai kekuatan ketiga antara RI dan Belanda. Kekuatan ketiga yang dapat menguntungkan kedudukan salah satu pihak apabila mampu memanfaatkan kekuatan BFO dengan baik. Bagi *republieken*, kekuatan BFO dapat dimanfaatkan karena masih terdapat orang-orang yang pro kepada RI seperti Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja. Bagi pihak Belanda, kedekatan BFO dengan RI merupakan suatu langkah yang dapat menggagalkan rencana Belanda membentuk negara federalis di Indonesia.

Usaha BFO mendekati RI dan Belanda menimbulkan pertanyaan dari semua kalangan baik *republieken* ataupun federalis. Pertanyaan tersebut mengenai keberpihakan BFO, apakah BFO memihak kepada RI atau BFO memihak kepada Belanda. Pertanyaan tersebut timbul karena di dalam BFO terdapat dua pihak yang berseberangan meskipun sama-sama menganut federalisme. Dua pihak yang berseberangan adalah pihak yang pro kepada RI dengan pimpinan Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja dan pihak yang pro kepada Belanda dengan pimpinan Sultan Hamid II dan Dr. T. Mansur.

Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO tersebut diberitakan surat kabar Merdeka dengan judul "*rol kaum federalis dalam perundingan yang akan datang, kemana mereka mau memihak*". Pada pemberitaan tersebut terlihat bahwa sebagian dari *republieken* tidak ingin tergesa-gesa menilai BFO telah memihak Belanda atau BFO memihak RI. Mereka sedang menunggu sikap pemerintah RI dan menunggu tindakan BFO dalam perjuangan RI memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Ketika Belanda melaksanakan agresi militer kepada RI di Jogjakarta, surat kabar Merdeka melaksanakan kembali tugasnya sebagai corong perjuangan republieken. Surat kabar Merdeka pada tanggal 25 Januari 1949 memberitakan dengan judul “*masih tetap ada*”. Pemberitaan tersebut mengenai keberadaan RI yang masih ada, karena presiden dan wakil presiden telah menyerahkan kekuasaannya kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebelum Jogjakarta di serang. Pemberitaan ini dinilai penting oleh surat kabar Merdeka, agar keamanan masyarakat dapat terkendali. Keberadaan RI tidak hanya berupa pemerintahan darurat, tetapi juga berupa wilayah yang masih bebas di Aceh. Keberadaan RI perlu diakui oleh rakyatnya sendiri agar pihak lainn juga mengakui keberadaan RI di bawah pemerintahan darurat ini.

Pertanyaan mengenai keberpihakan BFO dapat terjawab setelah BFO membuktikan bahwa usahanya untuk mendekati RI telah menunjukkan hasil. BFO mengadakan penghubungan dengan para pemimpin RI yang ditawan melalui komisi penghubung BFO (*contact commissie*). BFO dapat membuktikan bahwa dirinya bukan kaki tangan Belanda, walaupun beranggotakan negara dan daerah otonom bentukan Belanda. BFO dan RI merupakan bagian dari Indonesia, sehingga muncul pandangan dari anggota BFO bahwa permasalahan yang sedang terjadi antara RI dan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan bukan saja milik RI, tetapi juga milik BFO yang juga bagian dari Indonesia.

Republieken kembali menanyakan untuk siapa usaha BFO selama ini yang mengusahakan agar RI bersedia berunding dengan Belanda. Surat kabar Merdeka menyorot sikap republieken dengan pemberitaan yang berjudul “*sebagai patikelir atau wakil Republik*” pada tanggal 1 Februari. Pertanyaan republieken tidak terjawab karena BFO berprinsip bahwa apa yang dilakukannya untuk Indonesia seluruhnya. BFO juga berharap suatu saat nanti dapat

menyatukan pemikiran BFO yang federalis dengan RI, sehingga BFO dan RI dapat berjuang bersama mengatasmakan Indonesia seluruhnya.

Situasi politik Indonesia tidak menentu, karena RI dan Belanda masih mempertahankan pendapatnya. Belanda ingin pemimpin RI ikut berunding sebagai orang terkemuka, sedangkan pemimpin RI mengajukan syarat pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke Jogjakarta. Pemimpin RI mengajukan syarat tersebut karena tidak mungkin berunding selama statusnya masih tawanan perang dan pemimpin RI dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tidak diajak berunding oleh Belanda.

Situasi politik yang demikian membuat BFO berusaha lebih keras mendekati RI. Kegigihan BFO membuahkan hasil berupa kesepakatan bahwa RI bersedia berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Surat kabar Merdeka mengabarkan situasi yang sedang terjadi di Indonesia melalui sebuah karikatur pada tanggal 5 Maret 1949. Melalui gambar tersebut telah jelas bahwa sikap RI tetap seperti semula, yaitu berunding dengan persyaratan pemulihan kekuasaan dan pengembalian ke Jogjakarta.

Situasi politik kembali memanas ketika BFO tidak diikutsertakan dalam sebuah perundingan yang menghasilkan *Roem-Royen Statement (RR Statement)* antara RI, Belanda dan UNCI. Situasi demikian menyebabkan perpecahan di dalam BFO, karena wakil dari Sumatera menolak *RR Statement* dengan mengeluarkan resolusi Sumatera. Pada sebuah rapat internal BFO, resolusi Sumatera ditolak karena akan mengancam keutuhan BFO serta menghancurkan apa yang telah diperjuangkan BFO selama ini, yaitu kesediaan RI berunding dan membentuk NIS bersama RI.

Setelah pelaksanaan perundingan Roem-Royen akan diadakan kembali sebuah perundingan antara RI dan Belanda untuk membahas penyerahan kedaulatan dari Belanda. Pada kesempatan ini dimanfaatkan BFO

untuk mendekati dan meyakinkan RI bahwa permasalahan yang sedang terjadi tidak hanya permasalahan antara RI dan Belanda, tetapi antara Indonesia (BFO dan RI) dan Belanda. Usaha BFO berhasil, RI bersedia mengadakan sebuah perundingan antara BFO dan RI sebelum menghadiri KMB. Surat kabar Merdeka membuat karikatur peristiwa tersebut pada tanggal 6 Agustus 1949. Karikatur tersebut menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan bersama antara RI dan BFO untuk bersatu membawa nama Indonesia dalam KMB. Berhasilnya kesepakatan tersebut karena RI dan BFO menyadari bahwa tujuan dari perjuangan masing-masing pihak adalah untuk kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia dalam NIS.

Pemberitaan yang berbeda akan ditemui pada surat kabar yang diterbitkan oleh Belanda, contohnya surat kabar Pelita Rakjat. Surat kabar Pelita Rakjat berfungsi sebagai media informasi pemerintah Belanda di daerah federal. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat berbeda dengan pemberitaan surat kabar Merdeka. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat mengenai usaha Belanda membentuk negara federasi di Indonesia. Pemberitaan tersebut salah satunya adalah usaha van Mook membentuk NIS melalui konferensi federal di Bandung.

Surat kabar Pelita Rakjat, selalu mendukung usaha membentuk NIS di Indonesia. Peserta konferensi federal kembali mengadakan sebuah konferensi yang bernama konferensi kenegaraan tanpa hadirnya van Mook. Surat kabar Pelita Rakjat tidak memberitakan sebab-sebab ketidakhadiran van Mook dalam konferensi kenegaraan. Surat kabar Pelita Rakjat memberitakan bahwa konferensi kenegaraan Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja merupakan usaha untuk menghindari tindakan RI yang meminta kepada Dewan Keamanan agar memberikan kekuasaan yang lebih luas pada KDB.

Tindakan RI yang meminta kekuasaan lebih diberikan Dewan Keamanan kepada KDB akan

merugikan anggota BFO dan Belanda. Kerugian bagi Belanda adalah hilangnya kepercayaan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, sedangkan bagi anggota BFO adalah upaya mewujudkan federasi di Indonesia akan gagal. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat jelas untuk menutupi kekurangan konferensi federal dan tidak hadirnya van Mook dalam konferensi kenegaraan. Kekurangan konferensi federal yang dirasakan peserta rapat adalah tidak diberikannya kesempatan kepada peserta untuk bertanya ataupun mengubah isi rancangan pemerintahan buatan van Mook.

Usaha BFO mendekati RI menimbulkan kekhawatiran Belanda bahwa RI akan menjadikan BFO sebagai alat untuk melemahkan Belanda. Surat kabar Pelita Rakjat memberitakan dengan menyudutkan RI sebagai pihak yang keras kepala karena RI mempertahankan usul dari Dubois dan Critchley. Usul yang dipertahankan oleh RI mengenai pembentukan badan pembentuk undang-undang sebelum pembentukan pemerintah interim. Surat kabar Pelita Rakjat menggambarkan sikap RI yang keras kepala karena adanya kecurigaan RI terhadap Belanda, sehingga memandang masuknya federalisme seperti kembali kepada penjajahan Belanda. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat mengenai BFO lebih kepada memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung Belanda membentuk NIS di Indonesia.

E. Kesimpulan

Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO. Tokoh tersebut adalah Anak Agung, R.T Adil Puradireja, Sultan Hami II, dan T. Mansoer. Masing-masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI,

sedangkan Sultan Hami II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.

Anak Agung dan Adil Puradiredja membuat BFO mendekati RI berdasarkan pada pemikiran bahwa pemerintahan tanpa adanya RI akan berjalan pincang dan timbul kekacauan dimana-mana. Pemikiran kedua tokoh tersebut berdasar pada kenyataan adanya *republieken effect* di negaranya, dimana golongan *republieken* mampu menjadi golongan berpengaruh di dalam politik dan mampu menjatuhkan sebuah kabinet. Inilah yang mendasari kedua tokoh tersebut bertindak kooperatif dengan golongan *republieken*. Alasan lain dari usaha yang dilakukan kedua tokoh tersebut adalah RI telah menjadi pelopor dan lambang perjuangan kemerdekaan di Indonesia, serta tidak adanya tokoh yang berasal dari BFO yang mampu menandingi ketenaran nama-nama tokoh RI, khususnya Soekarno-Hatta.

Tindakan BFO mendekati RI dan di waktu yang lain juga mendekati Belanda, menarik perhatian surat kabar Merdeka dan Pelita Rakjat. Pemberitaan yang berasal dari kedua surat kabar tersebut mampu menggiring opini masyarakat di daerah yang menjadi daerah pemasaran masing-masing. Surat kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakyat berlomba-lomba untuk memberitakan usaha yang dilakukan BFO dalam membentuk NIS. Pemberitaan tersebut tentunya memiliki perbedaan sesuai dengan tujuan didirikannya surat kabar tersebut.

Surat kabar Merdeka menempatkan dirinya sebagai media informasi dari RI. Pemberitaan BFO pada surat kabar Merdeka sebagian besar merupakan pemberitaan mengenai usaha yang telah dilakukan BFO untuk mewujudkan federalisme di Indonesia. Pemberitaan tersebut dimaksudkan agar para pembaca pro RI untuk tetap waspada terhadap BFO. Perubahan pemberitaan surat kabar Merdeka terhadap BFO terjadi setelah adanya pembuktian dari BFO, bahwa usahanya selama ini adalah untuk berjuang bersama RI guna memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia.

Pemberitaan pada surat kabar Pelita Rakjat berbeda dengan surat kabar Merdeka. Perbedaan pemberitaan terjadi karena surat kabar Pelita Rakjat menempatkan dirinya sebagai salah satu media pemberi informasi bagi masyarakat di daerah pendudukan Belanda dan menyuarakan federalisme di Indonesia. Pemberitaan surat kabar Pelita Rakjat terhadap BFO merupakan bentuk dukungan karena telah memperjuangkan bentuk pemerintahan federal di Indonesia.

Pemberitaan pada surat kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat mengenai BFO menimbulkan persepsi baru di masyarakat setelah persepsi mengenai BFO yang akan melemahkan perjuangan RI (*republieken*) dan BFO akan dimanfaatkan RI untuk melawan Belanda. Persepsi baru mengenai BFO yaitu BFO dilihat sebagai salah satu pihak yang akan membantu menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Persepsi baru inilah yang kemudian menjadi kenyataan ketika BFO berhasil mendekati RI dan setuju untuk berjuang bersama menghadapi Belanda pada konferensi meja bundar (KMB).

F. Daftar Pustaka

Surat Kabar

Merdeka, bulan Mei 1948-1949.

Pandji Rakjat, 29 Mei 1948.

Pandji Rakjat, 1 Juni 1948.

Pandji Rakjat, 8 Juni 1948.

Pandji Rakjat, 18 Juni 1948.

Pelita Rakjat, Tahun 1948 – Februari 1949.

Soeloeh Rakjat, 24 Mei 1948.

Soeloeh Rakjat, 28 Mei 1948.

Soeloeh Rakjat, 1 Juni 1948.

Soeloeh Rakjat, 14 Juni 1948.

Soeloeh Rakjat, 25 Juli 1949.

Star Weekly, No.131 Tanggal 4 Juli 1948 – No. 153 Tanggal 5 Desember 1948.

Star Weekly, Tanggal 30 Januari 1949.

Buku

- A.B. Lopian dan P.J. Drooglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perpektif Sejarah*. Jakarta: Pustaka Utama Mandiri.
- Abdul Rahman Hakim. 2013. *Perundingan Roem-Royen dalam Pemberitaan dan Opini Harian Waspada Medan 1949*. Medan: Jurnal Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unimed.
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Andi Suwirta. 2000. *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) 1945-1949*. Jakarta: Balai Pustaka.
- G. Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad ke-20 Jilid II: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.
- G.A. Warmansjah, dkk. 1997. *Sejarah Revolusi Fisik Daerah DKI Jakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Garda Maeswara. 2010. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950: Perjuangan Bersenjata & Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan*. Yogyakarta: Narasi.
- Haryono Rinardi. 2012. *Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950*. Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol: 12, No: 2.
- Herbert Feith and Lance Castles. 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1963. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton-The Hague.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1983. *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irawan Soejito. 1976. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jakob Oetama. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kahin, G.M.T.,. 1995. *Naionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan-UNS Press.
- Lambert Giebels. 2001. *Soekarno: Biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Menuju Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, A.H.,. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7: Periode RENVILLE*. Bandung: DISJARAH AD dan Angkasa.
- Nasution, A.H.,. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II*. Bandung: DISJARAH AD dan Angkasa.
- Nasution, A.H.,. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11: Periode KMB*. Bandung: DISJARAH AD dan Angkasa.
- Nugroho Notosusanto. 1971. *Ichtisar Sedjarah RI (1945-Sekarang)*. Jakarta: Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI.
- Ricklefs, M.C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- R.Z. Leirissa, 2006. *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 Jilid 1*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Serikat Penerbit Surat Kabar (S.P.S). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar (S.P.S) – Pusat.
- Suparwoto dan Sugiharti. 1997. *Sejarah Indonesia Baru (1945-1949)*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya.
- Taufik, I., 1977. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Triyincio.
- Wendy Ayib Yoga Sasmita. 2011. *Pandangan Surat Kabar Soera Kalimantan dan Surat Kabar*

Merdeka terhadap Perjanjian Renville. Surabaya:
Skripsi Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah
FIS Unesa.

Internet

<http://eprints.unsri.ac.id/3681/1/2.> SUMATERA SEL
ATAN DALAM KERANGKA NEGARA FEDE
RAL BELANDA.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei
2014, pukul: 08.00.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEO
GRAFI/196001211985032-
ENOK MARYANI/Kalimantan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEO
GRAFI/196001211985032-
ENOK MARYANI/Kalimantan.pdf), diakses pada
tanggal 4 November 2012, pukul 10:17

Skripsi Online UPI. 2012. *Pemikiran Ide Anak Agung
Gde Agung Mengenai Negara Indonesia Serikat
1946-1949*, diakses pada tanggal 26 November
2012, pukul 08.00.

www.gahetna.nl, diakses pada tanggal 5 Desember
2012, pukul: 08.00.

www.KITLV.nl, diakses pada tanggal 7 Juli 2013,
pukul: 04.30.

www.niod.nl, diakses pada tanggal 1 April 2013,
pukul: 22.15.

